

BAB 3

Muhammadiyah dan Pancasila

B. Wacana Pancasila di Muhammadiyah

Pandangan dan komitmen Muhammadiyah untuk memperkokoh Pancasila dan merawat Kebinekaan telah tertuang di dalam Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah, pada point terakhir telah dinyatakan bahwa:

“Muhammadiyah mengajak kepada segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa Tanah Air yang mempunyai sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan undang-undang dasar 1945, untuk bersama-sama menjadikan suatu negara adi dan makmur yang di ridhoi Allah Swt. Balaqun Thayyibatun Wa Robbun Ghafur.

Dengan kata lain, Muhammadiyah tidak berhasrat membentuk negara lain selain Pancasila, termasuk negara formal Islam seperti Negara Khilafah Islam. Dalam hal ini posisi Muhammadiyah dalam memandang Pancasila telah dipertegas oleh keputusan Tanwir Muhammadiyah Bandung tahun 2012 yang menyatakan bahwa Muhammadiyah telah menerima bahkan ikut mendirikan NKRI sebagai konsensus nasional, yakni sebagai “*Darul Ahdi*” (Negara Perjanjian kolektif) dan “*Darus Syahadah*” (negara tempat Muhammadiyah mewujudkan pemikiran dan amaliah keislaman)

Bukti pandangan kebangsaan Muhammadiyah dapat di jumpai pada “Pernyataan Pikiran Abad ke Dua” yang menyatakan pemikirannya sebagai berikut.

“Secara dinamis dan transformatif dalam mewujudkan cita-cita nasional di tengah badai masalah dan tantangan zaman. Bahwa segala bentuk separatisme yang ingin memisahkan diri dari Indonesia dan mencita-citakan bentuk negara yang lain sesungguhnya bertentangan dengan komitmen nasional dan cita-cita proklamasi kemerdekaan. Demikian pula setiap bentuk penyelewengan dalam mengurus negara, korupsi, kolusi, nepotisme, penjualan aset-aset negara, pengrusakan sumberdaya alam dan lingkungan, penindasan terhadap rakyat,

otoritarianisme, pelanggaran hak asasi manusia, tunduk pada kekuasaan asing, serta berbagai tindakan yang merugikan hajat hidup bangsa dan negara merupakan penghianatan terhadap cita-cita kemerdekaan. Bangsa Indonesia sesungguhnya memiliki nilai-nilai keutamaan yang mengkrystal menjadi modal sosial dan budaya”

Kosmopolitanisme merupakan kesadaran tentang kesatuan masyarakat seluruh dunia dan umat manusia yang melampaui sekat-sekat etnik, golongan, kebangsaan, dan agama. Kosmopolitanisme secara moral mengimplikasikan adanya rasa solidaritas kemanusiaan universal dan rasa tanggung jawab universal kepada sesama manusia tanpa memandang perbedaan dan pemisahan jarak yang bersifat primordial dan konvensional. Muhammadiyah memiliki akar sejarah kosmopolitan yang cukup kuat.

Kosmopolitanisme Islam yang dikembangkan Muhammadiyah dapat menjadi jembatan bagi kepentingan pengembangan dialog Islam dan Barat serta dialog antar peradaban. Dalam perspektif baru konflik antar peradaban merupakan pandangan yang kadaluwarsa dan dapat menjadi pemicu benturan yang sesungguhnya. Tataan dunia baru memerlukan dialog, kerjasama, aliansi, dan koeksistensi antar peradaban.

Bersamaan dengan itu Muhammadiyah memandang bahwa peradaban global dituntut untuk terus berdialog dengan kebudayaan-kebudayaan setempat agar peradaban umat manusia semesta tidak terjebak pada kolonisasi budaya sebagaimana pernah terjadi dalam sejarah kolonialisme masa lampau yang menyengserakan kehidupan bangsa-bangsa. Globalisasi dan multikulturalisme tidak membawa hegemoni kolonialisme baru yang membunuh potensi kebudayaan lokal, tetapi sebaliknya mau berdialog dan mampu memberikan ruang kebudayaan untuk tumbuhnya local genius (kecerdasan lokal) dan local wisdom (kearifan lokal) yang menjadi pilar penting bagi kelangsungan peradaban semesta.

Dalam “Pernyataan Pikiran Abad ke-Dua” tersebut sudah dapat dilihat bahwa Muhammadiyah sangat komitmen terhadap kerukunan, perdamaian dan anti terhadap sparatisme yang dapat menghancurkan NKRI, Pancasila dan Kebhinekaan. Wacana Pancasila di dalam Muhammadiyah sudahlah final di dalam tingkatan pusat, yang artinya bahwa Muhammadiyah dengan segala daya dan upayanya tentu akan ikut merawat Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa. Dengan menjadikan “*Negara Pancasila sebagai darul ahdi wasy syahadah*” sebagai pandangan organisasi dan sebuah rumusan penting dari sisi teologis politik merupakan langkah yang sangat bijaksana, untuk menghargai kesepakatan bersama

yang telah di bangun oleh para pendiri bangsa indonesia yang ingin negara indonesia dibangun berdasarkan keberagaman dan saling toleransi satu sama lainnya.

Tidak ada pertentangan terkait dengan pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia di dalam Struktural Muhammadiyah di tingkat pusat. Muhammadiyah sebagai satu gerakan dakwah yang senantiasa mengelorakan api semangat kebaikan melalui gerakan dakwah Islam Berkemajuan memandang bahwa setiap butir Pancasila sejalan dengan pikiran Islam dan tentunya pikiran ketuhanan merupakan kunci utama dalam setiap silanya.

Pertentangan terkait dengan Pancasila sebagai dasar negara terjadi bukan di tingkat pusat namun terjadi pada tingkatan Pimpinan Wilayah. Hal tersebut disampaikan oleh Din Syamsudin dalam (MPK PPM, 2017:16) Ketika Tanwir Muhammadiyah terjadi dialog antara DS dengan salah satu Pimpinan Wilayah dan kader Muhammadiyah di padang yang menginginkan Indonesia dibangun berdasarkan “Syariat Islam” dan “Negara Khilafah”. Hal tersebut merupakan tindakan yang wajar di lontarkan oleh kader Muhammadiyah yang meski secara organisatoris Muhammadiyah tidak mendukung pendirian Negara Khilafah dan cenderung berfaham tengahan atau moderat. Namun, Muhammadiyah tidak dapat sepenuhnya mengontrol para kadernya untuk memiliki pemikiran yang sama dengan pemikiran organisasi.

A.1. Pancasila Selaras Dengan Nilai-Nilai Keislaman

Kembali lagi terhadap asas pancasila tidak ada pertentangan dengan ajaran Islam yang bersumber pada Alquran dan As-Sunnah dan Ajaran Agama apapun di Indonesia. Jika kemudian kita menengok di dalam Al-Quran semua asas di

pancasila terdapat juga di dalam Al-Quran. Sebagai falsafah hidup bangsa, hakekat nilai-nilai Pancasila telah hidup dan diamalkan oleh bangsa Indonesia sejak negara ini belum berbentuk. Artinya, rumusan Pancasila sebagaimana tertuang dalam alinea 4 UUD 1945 sebenarnya merupakan refleksi dari falsafah dan budaya bangsa, termasuk di dalamnya bersumber dan terinspirasi dari nilai-nilai dan ajaran agama yang dianut bangsa Indonesia.

Agama dan Pancasila merupakan dua hal yang melekat dalam nilai kultur masyarakat Indonesia. Kedua hal itu merupakan dua hal yang sama sekali tidak bertentangan karena nilai-nilai agama diejawantahkan dalam sisa-sila Pancasila. Amin Abdullah dalam paparannya dalam Konverensi Nasional Indonesia Berkemajuan menyatakan bahwa pemikiran politik keislaman di Indonesia penting untuk terus dikembangkan agar agama dan pancasila dapat berjalan berbarengan untuk menangkal pergolakan seperti fenomena Arab Spring yang melanda negara-negara Timur Tengah.

Islam di Indonesia memiliki korelasi kultural dengan pancasila yang membuat pemikiran politik keislaman di Indonesia lebih mudah diterapkan. Pemikiran politik keislaman sangat sulit dikembangkan di negara Timur Tengah. Indonesia dengan Pancasila dapat mengembangkan pemikiran tersebut lebih mudah melihat kultur di Indonesia. Pemikiran tersebut penting untuk menangkal Arab Spring masuk ke Indonesia. Tantangannya sekarang adalah kompleksitas antara agama dan pluralitas di Indonesia.

Senada dengan Amin Abdullah, Romo Magnis suseno, sebagai salah satu representasi non muslim juga menyampaikan bahwa, Islam tidak bisa lepas dari kebangkitan nasional, hal yang digaribawahi dari kebangkitan Islam itu pula.

Pancasila merupakan sumbangan yang luar biasa ketika para tokoh Islam tidak mengkhususkan posisi Islam dalam konstitusi dan dasar negara. *“Kebangkitan Islam adalah bagian dari kebangkitan nasional dengan adanya Budi Oetomo, Serikat Indonesia, dan Muhammadiyah. Hebatnya mereka tidak mengkhususkan posisi Islam dalam ideologi dan dasar negara. Itu merupakan sumbangan yang luar biasa,”* ungkap Romo Magnis.

Lebih lanjut romo magnis membandingkan antara Indonesia tahun 1998 dan Mesir tahun 2010 yang sama-sama mengalami democratic spring. Mesir gagal menjalankan demokrasi, Indonesia berhasil menjalankan demokrasi beringingan dengan Islam lewat tokoh-tokoh Islam seperti B.J. Habibie, Amin Rais, dan Gus Dur.

Prof. Syafiq A. Mughni, masih dalam acara yang sama memaparkan bahwa agama dan Pancasila adalah dua hal yang sama sekali tidak bertentangan. *“Agama dan Pancasila sama sekali tidak bertentangan dan nilai agama diejawantahkan dalam pancasila di mana sila-sila yang ada itu sebetulnya nilai agama yang mendasari, Muhammadiyah komitmen terhadap kedua hal itu,”* terang Syafiq Mughni.

Islam sebagai agama yang dipeluk secara mayoritas oleh bangsa ini tentu memiliki relasi yang sangat kuat dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini dapat disimak dari masing-masing sila yang terdapat pada Pancasila berikut ini:

Sila pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ketuhanan adalah prinsip semua agama. Dan prinsip keesaan Tuhan merupakan inti ajaran Islam, yang dikenal dengan konsep tauhid. Dalam Islam tauhid harus diyakini secara kaffah (totalitas), sehingga tauhid tidak hanya berwujud pengakuan dan pernyataan saja. Akan tetapi, harus dibuktikan dengan tindakan nyata, seperti melaksanakan

kewajiban-kewajiban agama, baik dalam konteks hubungan vertikal kepada Allah (ubudiyah) maupun hubungan horisontal dengan sesama manusia dan semua makhluk (*hablun minan nas*).

Totalitas makna tauhid itulah kemudian dikenal dengan konsep *tauhid ar-rububiyah*, *tauhid al-uluhiyyah* dan *tauhid al-asma wa al-sifat*. *Tauhid Rububiyah* adalah pengakuan, keyakinan dan pernyataan bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, pengatur dan penjaga alam semesta ini. Sedangkan *tauhid al-Uluhiyyah* adalah keyakinan akan keesaan Allah dalam pelaksanaan ibadah, yakni hanya Allah yang berhak diibadahi dengan cara-cara yang ditentukan oleh Allah (dan Rasul-Nya) baik dengan ketentuan rinci, sehingga manusia tinggal melaksanakannya maupun dengan ketentuan garis besar yang memberi ruang kreativitas manusia seperti ibadah dalam kegiatan sosial-budaya, sosial ekonomi, politik kenegaraan dan seterusnya, disertai dengan akhlak (etika) yang mulia sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah. Adapun *tauhid al-asma wa al-sifat* adalah bahwa dalam memahami nama-nama dan sifat Allah seorang muslim hendaknya hanya mengacu kepada sumber ajaran Islam, Quran-Sunnah. (Syamsudin dalam MPK PPM, 2017: 162))

Melihat paparan di atas pengamalan sila pertama sejalan bahkan menjadi kokoh dengan pengamalan tauhid dalam ajaran Islam. Inilah, yang menjadi pertimbangan Ki Bagus Hadikusumo, ketika ada usulan yang kuat untuk menghapus 7 kata “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”, mengusulkan kata pengganti dengan “Yang Maha Esa”. Dalam pandangan beliau Ketuhanan Yang Maha Esa adalah tauhid bagi umat Islam. (Endang Saifuddin, 1981: 41-44)

Sila kedua, “*Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*”. Prinsip kemanusiaan dengan keadilan dan keadaban adalah juga menjadi ajaran setiap agama yang diakui oleh negara Indonesia, termasuk Islam. Dalam ajaran Islam, prinsip ini merupakan manifestasi dan pengamalan dari ajaran tauhid. *Muwahhidun* (orang yang bertauhid) wajib memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi dengan sikap yang adil dan berkeadaban.

Sikap adil sangat ditekankan oleh ajaran Islam, dan sikap adil adalah dekat dengan ketaqwaan kepada Allah sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al Maidah ayat 8

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Demikian juga konsep beradab (berkeadaban) dengan menegakkan etika dan akhlak yang mulia menjadi misi utama diutusny Nabi Muhammad Saw dengan sabdanya, “*Sesungguhnya aku diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.*”

Sila ketiga, “*Persatuan Indonesia*” Ajaran Islam memerintahkan agar umat Islam menjalin persatuan dan kesatuan antar manusia dengan kepemimpinan dan organisasi yang kokoh dengan tujuan mengajak kepada kebaikan (al-khair), mendorong perbuatan yang makruf, yakni segala sesuatu yang membawa maslahat (kebaikan) bagi umat manusia dan mencegah kemungkaran, yakni segala yang membawa madharat (bahaya dan merugikan) bagi manusia seperti tindak kejahatan. Persatuan dan kesatuan dengan organisasi dan kepemimpinan yang kokoh itu dapat berbentuk negara, seperti negeri tercinta Indonesia.

Sila keempat, “*Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan*” Prinsip yang ada pada sila keempat ini merupakan serapan dari nilai-nilai Islam yang mengajarkan kepemimpinan yang adil, yang memperhatikan kemaslahatan rakyatnya dan di dalam menjalankan roda kepemimpinan melalui musyawarah dengan mendengarkan berbagai pandangan untuk didapat pandangan yang terbaik bagi kehidupan bersama dengan kemufakatan. Sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia dengan mengedepan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan sebagaimana ditegaskan dalam sila-sila dalam Pancasila sejalan dengan ajaran agama. Bahkan pengamalan agama akan memperkokoh implementasi ideologi Pancasila.

Sila Kelima: “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” Mengelola negara dengan prinsip keadilan yang meliputi semua aspek, seperti keadilan hukum, keadilan ekonomi, dan sebagainya, yang diikuti dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat merupakan amanat setiap agama bagi para pemeluknya. Dalam Islam di ajarkan agar pemimpin negara memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, dan apabila menghukum mereka hendaklah dengan hukuman yang adil. (QS. Nisa: 58) Dalam kaidah fikih Islam dinyatakan “*al-ra’iyyatu manuthun bil maslahah*”, artinya kepemimpinan itu mengikuti (memperhatikan) kemaslahatan rakyatnya. Berarti pula bahwa pemegang amanah kepemimpinan suatu negara wajib mengutamakan kesejahteraan rakyat. (Majalahtabligh.com/2017/hubungan-pancasila-dengan-nilai-ajaran-islam)

Selain itu, Amin rais, salah satu Tokoh Nasional yang pernah menjabat sebagai ketua umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2000-2002 dalam salah satu siaran diskusi Indonesia Lawyers Club yang disiarkan oleh TV one pada

(15/2/2018) mengatakan bahwa "*Pancasila memiliki lima kosa kata yang tertuang di dalam al quran, kata adil dan beradab hanya berada di dalam al quran dan tidak ada di kosa kata bahasa lain baik itu bahasa indonesia maupun bahasa yang lainnya.*"

A.2. Varian Ideologi Kader Muhammadiyah

Secara Organisatoris Muhammadiyah tidaklah menentang Pancasila sebagai ideologi bangsa, Namun mengingat Muhammadiyah memiliki kader dengan berbagai rupa varian ideologi, konsekuensinya adalah sikap yang dipilih oleh kader Muhammadiyah kadang kala bertentangan dengan pandangan Organisasi. Pertentangan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia masih kerap dipermasalahkan oleh warga Muhammadiyah di tingkatan bawah. Seperti yang terjadi dalam tulisan yang telah dijelaskan diatas

Keberagaman pandangan warga Muhammadiyah ini dapat dicermati melalui penelitian Abdul Munir Mulkan di Wuluhan, jember yang kemudian olehnya dibagi menjadi 4 varian dalam perspektif sosiologi-keagamaan. Yaitu, *Pertama*, Muhammadiyah-Ikhlas, *kedua*; Muhammadiyah-Kiai Ahmad Dahlan, *ketiga*; Muhammadiyah-NU (MuNu), *keempat*; Muhammadiyah-Marhean (MarMud).

Studi yang dilakukan abdul Munir Mulkan ini merupakan penyempurnaan dari studi yang telah dilakukan oleh bintaro. Penelitian yang dilakukan bintaro ini setidaknya menyangkut dua aspek sikap warga

muhammadiyah dalam memandang pluralisme. *Pertama*; varian warga muhammadiyah yang setuju dan menerima pluralitas agama dengan argumentasi yang di gunakan adalah dalam memahami pluralisme agama harus di bedakandengn pluralitas dan *diversitas* agama, sebab pluralisme keagamaan lebih sekedar pengakuan secara pasif terhadap keragaman keyakinan dan agama lain.

Kedua; kaum muda Muhammadiyah yang menolak tegas wacana Pluralisme

agama, argumentasi yang di gunakan bahwa pluralisme agama adalah paham yang mengajarkan semua agama benar dan ini bertentang dengan keyakinan bahwa agama yang paling benar di sisi Allah hanyalah Islam bukan yang lain. Artinya dari dua studi di atas, dapat di pahami bahwa antara “teks idealias” (teks ideologi Muhammadiyah) dengan realitas prilaku sosial keberagaman Muhammadiyah itu berbeda, sangat variatif.

Sholihul Huda, Menulis sebuah penelitian yang berjudul, “Varian Ideologi Keberagaman di Muhammadiyah dari Moderat hingga Radikal” (2016) Yang menurutnya ada 5 sebab latar belakang model varian ideologi di Muhammadiyah dan penyebabnya kenapa bisa terjadi. *Pertama*, Muhammadiyah adalah teks realitas sosial keagamaan muhammadiyah sangat dinamis yang berarti akan terus mengalami dialektika pergerakan dan perubahan akan dpat dirubah dan disesuaikan smenurut perkembangan zaman biar tidak dianggap *stagnan*, jumud “tradisional”. Apalagi dengan mengusung gerakan pembaharuan Islam (*Tajdid*), maka semakin mempengaruhi alam berfikir warga Muhammadiyah untuk di tuntutan berfikir dan berperilaku modern, dan ini membutuhkan pembacaan ulang terus-menerus terhadap Muhammadiyah.

Kedua, posisi struktur sosio-kultur pengikut Muhammadiyah bervariasi. Pada awal berdirinya Muhammadiyah banyak di *back up* oleh mayoritas pedagang dan priyayi (abdi dalem Keraton Ngayogyakarta), kemudian bergeser pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) terutama guru dan dosen yang mayoritas tinggal dipertanian, sehingga Muhammadiyah lebih cepat berkembang di Perkotaan daripada di Pedesaan. Perkembangan selanjutnya, dakwah Muhammadiyah mulai menjangkau masyarakat pedesaan dan beragam komunitas sosial mulai Pekerja Seks Komersial (PSK), Petani, Buruh, Nelayan, Blogger, Eksekutif Muda, Pengusaha Artis dan sebagainya.⁴ Kondisi ini tentu berdampak bagi Muhammadiyah, mereka mengkonstruksi Muhammadiyah sesuai “alam berfikir” dan latar sosio-kulturnya, sehingga punya warna tersendiri di kalangan Muhammadiyah.

Ketiga, ragam pemahaman terhadap pemikiran ideal Kiai Ahmad Dahlan yang dikaitkan dengan realitas sosial. Muhammadiyah adalah wujud dari cita-cita ideal Kiai Ahmad Dahlan dalam membangun masyarakat Islam dengan di landasi pada spirit nilai-nilai Islam, “*welas asih*” dan reformasi (*tajdid*).⁵ Cita-cita ideal inilah yang terus di konstruksi dengan beragam metodologi dan kepentingan untuk menemukan konstruksi se ideal mungkin dengan cita-cita Kiai Ahmad Dahlan dalam menjawab problematika masyarakat. Karena beragam metodologi dan kepentingan, maka secara otomatis hasil konstruksi pemahaman tersebut juga bervariasi. Ragam ini tentu mempengaruhi konstruksi ideal terhadap Muhammadiyah

Keempat, paradigma dan metodologi keilmuan yang berbeda dalam memahami realitas sosial Muhammadiyah dengan problem masyarakat kontemporer. Warga Muhammadiyah beragam latar pendidikan, mulai tidak

sekolah sampai Profesor. Polarisasi latar ini berdampak pada paradigma dan metodologi yang digunakan dalam memahami dan menyikapi persoalan di Muhammadiyah. Fenomena ini dapat di amati ada sebagian warga Muhammadiyah yang masih berkuat pada pembahasan hukum Qunut Sholat Shubuh, TBC, Tahlilan, Ziarah Kubur, *Tingkepan*, dan sebagainya, namun ada juga yang sudah membahas *internasionalisasi* Muhammadiyah di aras global. Potret di atas menggambarkan bahwa struktur sosio-kultur warga Muhammadiyah tidak tunggal. Kondisi ini secara alamiah mempengaruhi polarisasi pemahaman dan sikap keberagamaan di internal Muhammadiyah. Artinya, walaupun secara konsep, rumusan ide dan strategi perjuangan (ideologi) di sepakati bersama dan tunggal melalui keputusan organisasi, tetapi dalam proses pemahaman terhadap ideologi bervariasi, sehingga menimbulkan sikap sosialkeberagamaan yang bervariasi.

Semisal ada ber-Muhammadiyah dengan paham ideologi Islam Moderat, Islam Puritan, Islam Liberal bahkan Islam Radikal “garis keras”. Polarisasi paham ideologi tersebut juga berpengaruh terhadap pemahaman dan penyikapan *diskursus* pemikiran Islam di kalangan Muhammadiyah. Wacana hangat yang jadi perdebatan di kalangan Muhammadiyah, *pertama*; penyikapan terhadap isu-isu pemikiran Islam kontemporer, seperti masalah Liberalisme, Sekulerisme, Pluralisme, Gender, HAM, Demokrasi, toleransi antar non-Muslim dan sebagainya. *Kedua*, penyikapan terhadap relasi Islam dan politik, persoalan ini hingga saat ini masih menjadi perdebatan hangat terutama berkaitan dengan konsep Negara Islam (*dawlah Islamiyah*), Khilafah Islamiyah, Formalisasi Syariat Islam, dan sebagainya.

Ketiga; penyikapan terhadap idealisasi model dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* di masyarakat, persoalan ini juga menjadi pewacanaan di kalangan aktivis Muhammadiyah, terutama berkaitan dengan aktualisasi dakwah Muhammadiyah di tengah kemungkaran sosial dan problem akibat modernitas dan westernisasi. Wacana di atas dipahami dan di konstruksi oleh warga Muhammadiyah

secara beragam. Konstruksi itu sangat di pengaruhi oleh konstruksi ideologinya. Pada kajian ini dapat dipotret varian ideologi keberagaman Muhammadiyah dari prespektif pemahaman ideologinya.

Pertama; varian ideologi keberagaman Moderat. Varian ini memahami ideologi Muhammadiyah secara terbuka (*inklusif*). Maksudnya, keberadaan Muhammadiyah di masyarakat tidaklah sendiri, tetapi berhimpit dengan gerakan sosial keagamaan yang lain (NU, PERSIS, AL-Irsyad, Syiah, FPI, HTI, dll), sehingga harus saling menghormati dan toleran. Kelompok ini terbuka dengan perubahan baru, namun tetap memperhatikan tradisi puritan Muhammadiyah. Kelompok ini mendasarkan pemahamannya pada kaidah Ushul al-Fiqh "*alMukhafadhatu „ala qadhimi al-ashlah wal akhdzu ala jadidi al-ashlah*" (Menjaga

yang lama yang baik dan mengambil yang baru yang baik). Varian ini dapat menerima wacana Liberalisme, Sekulerisme, Pluralisme, toleransi namun tidak harus diikuti semua, apabila ada yang baik maka dapat di adopsi dengan tradisi Muhammadiyah.

Kedua, varian ideologi keberagaman puritan. Varian ini memahami ideologi Muhammadiyah secara tertutup (*eksklusif*), artinya ideologi

Muhammadiyah sudah final dan terbaik kebenarannya daripada ideologi keagamaan yang lain. Ideologi Muhammadiyah adalah ideologi yang berdasarkan al-Qur'an Hadits, dan berIslam itu harus "murni" berdasarkan pedoman al-Qur'an Hadits dan hasil putusan Tarjih Muhammadiyah. Putusan Tarjih Muhammadiyah dipahami sudah sesuai dengan al-Qur'an-Hadits, tidak boleh dicampur dengan tradisi Tahayul, Bid'ah dan Khurufat (TBC). Varian ini paling *fundamentalis* dan konsisiten dalam mempraktekan Islam murni ala Majelis Tarjih, atau pinjam istilah Munir Mul Khan adalah Kelompok "Muhammadiyah Al-Ikhlash"⁷ atau disebut juga Muhammadiyah "Tus".⁸

Ketiga; varian ideologi keberagamaan Liberal. Varian ini memahami bahwa ideologi Muhammadiyah harus di dekonstruksi ulang karena, di anggap kurang relevan untuk dapat menjawab problematika kontemporer.

Konsep-konsep ideologi Muhammadiyah di anggap produk masa lalu, sehingga Muhammadiyah dianggap stagnan, ketinggalan, *jumud*, gagap dan sebagainya. Oleh karena itu jika Muhammadiyah ingin maju "modern", maka di perlukan dekonstruksi ulang ideologi dengan mengadopsi penuh tradisi Barat. Semisal pemikiran tentang Liberalisme, Sekulerisme, Pluralisme, HAM, demokrasi dan sebagainya. Varian ini melakukan dekonstruksi ideologi Muhammadiyah dengan menggunakan perangkat keilmuan kontemporer, semisal filsafat, sejarah, sosiologi, antropologi, psikologi, politik dan sebagainya.

Keempat; varian ideologi keberagamaan radikal "garis keras". Kemunculan varian ini dilandasi pada kajian posisi Muhammadiyah dengan penegakkan Syariat Islam (*Khilafah Islamiyah*) di Indonesia serta wacana aktualisasi ideologi dakwah *amar ma'aruf nahi mungkar* Muhammadiyah di

masyarakat. *Pertama*; pada wacana penegakkan Syariat Islam Indonesia, varian ini beranggapan ideologi Muhammadiyah tidak tegas dalam memperjuangkan penegakkan Syariat Islam di Indonesia “abu-abu” tidak seperti yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Islam lainnya seperti Hizbut at-Tahrir (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), KISDI, Komite Penerapan Syariat Islam (KPSI) dan sebagainya.

Kedua; pada wacana aktualisasi dakwah *amar ma'ruf nahi mungkar* di masyarakat, varian ini beranggapan ideologi dakwah Muhammadiyah hanya berkuat pada dakwah “*amar ma'ruf*” amal baik, namun tidak tegas dan jelas pada aktualisasi dakwah “*nahi mungkar*” terkesan gagap dan membiarkan, tidak seperti yang dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI) yang lebih tegas dan keras dalam dakwah “*nahi mungkar*” Konstruksi pemahaman ideologi tersebut menjadikan mereka mengambil langkah dengan mengadopsi ideologi kelompok Islam radikal, bahkan terlibat juga di dalamnya. Sehingga, pola ini kemudian mempengaruhi sikap keberagamaan mereka di Muhammadiyah cenderung radikal dan keras mirip “gaya” kelompok Islam radikal yang dianggap lebih Islami dari pada Muhammadiyah

A.3. Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah

Pedoman hidup islami warga Muhammadiyah merupakan seperangkat pedoman untuk menjalani kehidupan dalam setiap aspek kehidupan termasuk diantaranya adalah kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, berorganisasi, mengelola amal usaha, berbisnis, mengembangkan profesi, berbangsa dan bernegara, melestarikan lingkungan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan

teknologi serta mengembangkan seni dan budaya. PHIWM ini dilandaskan dan disusun berdasarkan Al- Quran dan Sunnah Nabi yang merupakan pengembangan dan pengayaan dari pemikiran-pemikiran formal (baku) dalam Muhammadiyah seperti Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah, Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, Matan Kepribadian Muhammadiyah, Khittah Perjuangan Muhammadiyah, serta hasil-hasil Keputusan Majelis Tarjih.

Urgensi Penyusunan PHIWM ini karena warga Muhammadiyah memerlukan seperangkat panduan dan pengayaan dalam menjaani berbagai kegiatan sehari-hari yang selaras dengan kondisi dan situasi diantara lain:

1. Kepentingan akan adanya pedoman yang dijadikan acuan bagi segenap anggota Muhammadiyah sebagai penjabaran dan bagian dari Keyakinan Hidup Islami Dalam Muhammadiyah yang menjadi amanat Tanwir Jakarta 1992 yang lebih merupakan konsep filosofis.
3. Perubahan-perubahan sosial-politik dalam kehidupan nasional di era reformasi yang menumbuhkan dinamika tinggi dalam kehidupan umat dan bangsa serta mempengaruhi kehidupan Muhammadiyah, yang memerlukan pedoman bagi warga dan pimpinan Persyarikatan bagaimana menjalani kehidupan di tengah gelombang perubahan itu.
4. Perubahan-perubahan alam pikiran yang cenderung pragmatis (berorientasi pada nilai-guna semata), materialistis (berorientasi pada kepentingan materi semata), dan hedonistis (berorientasi pada pemenuhan kesenangan duniawi) yang menumbuhkan budaya inderawi (kebudayaan duniawi yang sekular) dalam kehidupan modern abad ke-20 yang disertai dengan gaya hidup modern memasuki era baru abad ke-21.

5. Penetrasi budaya (masuknya budaya asing secara meluas) dan multikulturalisme (kebudayaan masyarakat dunia yang majemuk dan serba melintasi) yang dibawa oleh globalisasi (proses hubungan-hubungan sosialekonomi- politik-budaya yang membentuk tatanan sosial yang mendunia) yang akan makin nyata dalam kehidupan bangsa.
6. Perubahan orientasi nilai dan sikap dalam bermuhammadiyah karena berbagai faktor (internal dan eksternal) yang memerlukan standar nilai dan norma yang jelas dari Muhammadiyah sendiri.

Muhammadiyah telah mengatur dalam PHIWM tentang pedoman dalam bernegara dan berbangsa yang isinya diantara lain adalah:

1. Warga Muhammadiyah perlu mengambil bagian dan tidak boleh apatis (masa bodoh) dalam kehidupan politik melalui berbagai saluran secara positif sebagai wujud bermuamalah sebagaimana dalam bidang kehidupan lain dengan prinsip-prinsip etika/akhlaq Islam dengan sebaik-baiknya dengan tujuan membangun masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
2. Beberapa prinsip dalam berpolitik harus ditegakkan dengan sejujur-jujurnya dan sungguh-sungguhnya yaitu menunaikan amanat dan tidak boleh mengkhianati amanat, menegakkan keadilan, hukum, dan kebenaran, ketaatan kepada pemimpin sejauh sejalan dengan perintah Allah dan Rasul, mengemban risalah Islam, menunaikan amar ma'ruf, nahi munkar, dan mengajak orang untuk beriman kepada Allah, mempedomani Al-Quran dan Sunnah, mementingkan kesatuan dan persaudaraan umat manusia, menghormati kebebasan orang lain, menjauhi fitnah dan kerusakan, menghormati hak hidup orang lain, tidak berkhianat dan melakukan kezaliman, tidak mengambil hak orang lain, berlomba

dalam kebaikan, bekerjasama dalam kebaikan dan ketaqwaan serta tidak bekerjasama (konspirasi) dalam melakukan dosa dan permusuhan, memelihara hubungan baik antara pemimpin dan warga, memelihara keselamatan umum, hidup berdampingan dengan baik dan damai, tidak melakukan fasad dan kemunkaran, mementingkan ukhuwah Islamiyah, dan prinsip-prinsip lainnya yang maslahat, ihsan, dan islah.

3. Berpolitik dalam dan demi kepentingan umat dan bangsa sebagai wujud ibadah kepada Allah dan islah serta ihsan kepada sesama, dan jangan mengorbankan kepentingan yang lebih luas dan utama itu demi kepentingan diri sendiri dan kelompok yang sempit.
4. Para politisi Muhammadiyah berkewajiban menunjukkan keteladanan diri (*uswah hasanah*) yang jujur, benar, dan adil serta menjauhkan diri dari perilaku politik yang kotor, membawa fitnah, *fasad* (kerusakan), dan hanya mementingkan diri sendiri.
5. Berpolitik dengan kesalihan, sikap positif, dan memiliki cita-cita bagi terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dengan fungsi amar ma'ruf dan nahi munkar yang tersistem dalam satu kesatuan imamah yang kokoh.
6. Menggalang silaturahmi dan ukhuwah antar politisi dan kekuatan politik yang digerakkan oleh para politisi Muhammadiyah secara cerdas dan dewasa.

A.4. Konferensi Indonesia Berkemajuan

Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan (KNIB) berlangsung sejak Senin, 23 Mei 2016 dan ditutup secara resmi pada Selasa, 24 Mei 2016 bertempat

di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). KNIB merupakan forum lintas kelompok, profesi, agama dan budaya yang dimaksudkan sebagai forum untuk menghimpun gagasan, pengalaman dan idealisme untuk mewujudkan Indonesia sebagai bangsa dan negara yang maju, adil, makmur, sejahtera dan bermartabat.

Ketika KNIB dilangsungkan, Indonesia sedang mengalami beberapa krisis yang mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara, isu terorisme, LGBT, terorisme yang kemudian bisa kita simpulkan bahwa isu-isu tersebut sebagai ibas dari nilai-nilai Pancasila dan budaya bangsa yang kurang diresap secara baik. Banyak budaya dari luar yang kemudian di terima mentah-mentah, contohnya seperti LGBT sebagai hasil dari budaya barat yang terlalu liberal dan mengusung kebebasan tanpa batas. Maka sangat serasi jika Muhammadiyah mengadakan KNIB demi menjawab berbagai persoalan bangsa dan merumuskan rekomendasi yang nantinya akan menjadikan kondisi Indonesia semakin membaik.

Selama dua hari tersebut, para narasumber yang hadir telah menyampaikan gagasan-gagasannya dalam mewujudkan visi Indonesia berkemajuan. Gagasan-gagasan tersebut menghasilkan pokok-pokok pikiran hasil KNIB di antaranya:

1. Indonesia adalah rumah bersama yang dibangun di atas nilai-nilai dan cita-cita luhur 1945. Karena itu, segenap komponen bangsa memiliki kewajiban kolektif membangun keunggulan bangsa, yang ditopang oleh kepemimpinan perubahan, budaya publik yang rasional-konstruktif, politik yang demokratis-berkeadilan yang efektif dan produktif, serta ekonomi yang berdaya saing tinggi, menuju Indonesia yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat.

2. Bangsa Indonesia harus bekerja lebih keras, cerdas, kreatif, inovatif dan percaya diri untuk menyelesaikan masalah kesenjangan sosial, politik, korupsi, kekerasan, moralitas, kriminalitas dan daya saing yang rendah.
3. Dalam bidang politik perlu didorong konsolidasi demokrasi yang berbasis nilai, etik, dan amanah untuk memperkuat good governance, clean government dan meritokrasi sehingga melahirkan kepemimpinan nasional dan daerah yang kuat, melayani, mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, partai politik, dan primordialisme agama dan budaya.
4. dalam bidang hukum dan pemerintahan diperlukan penguatan Indonesia sebagai negara hukum dimana seluruh sistem penyelenggaraan negara, penyelenggara negara dan masyarakat mematuhi hukum yang berlaku. KNIB memandang penting dilakukannya amandemen kelima UUD 1945 terutama yang berkaitan dengan Haluan Negara, kedudukan, susunan dan fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. Penguatan Pancasila sebagai Dasar Negara dan sumber nilai dan etik yang memandu dan mempersatukan bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945,” jelas Dahlan Rais lagi.
5. Bangsa Indonesia memerlukan revolusi mental dan revolusi budaya sebagai prasyarat membangun bangsa yang berkarakter kuat, berakhlak mulia, berkeadaban luhur yang dibangun melalui pendidikan yang bermutu dan berkeunggulan.
6. Bangsa Indonesia memerlukan tatanan kehidupan sosial dan politik yang lebih kuat berlandaskan spirit persatuan Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan visi

bersama untuk mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang kuat dan bermartabat.

Dalam KNIB dideklarasikan pembentukan Perkumpulan Pergerakan Indonesia Maju (PIM) pada april 2016 dimana Din Syamsudin ditetapkan sebagai ketuanya. PIM ditujukan untuk fokus untuk menggalang potensi kemajemukan bangsa yang bersifat lintas agama, suku, profesi, gender sekalipun untuk dijadikan kekuatan. Implementasi nyata dari fokus PIM tersebut diwujudkan dari tingkat tataran atas konseptual hingga tingkat bawah yang melibatkan semua pihak mulai pemerintah hingga rakyat di pedesaan. Semua visi itu terangkum dalam dasa cita budaya berkemajuan yang Din sampaikan pada pidato kebangsaan bertajuk “Indonesia Maju”.

Poin-poin penting yang tercantum dalam dasa cita tersebut antara lain maju dari kebiasaan mementingkan diri sendiri, maju dari tirani, maju dari sifat feodalisme dan primordialisme, maju dari budaya nepotisme, maju dari kecenderungan menganiaya diri sendiri, maju dari budaya kekerasan, maju dari kebiasaan korupsi, maju dari ketergantungan negara lain, maju dari rasa rendah diri, dan maju dari kecintaan pada dunia. Din menyatakan hal terpenting dalam mewujudkan Indonesia maju yakni adanya budaya berkemajuan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Budaya-budaya itulah yang terangkum dalam dasa cita budaya berkemajuan. PIM ini tidak sama sekali ditujukan sebagai partai politik pada kemudian hari, karena sedari awal dibentuknya PIM adalah untuk terlibat langsung dalam aksi yang bersifat kultural (umy.ac.id, 23 mei 2016)

PIM sebagai organisasi masyarakat berhimpit dengan visi Muhammadiyah untuk mewujudkan Indonesia berkemajuan, Din Syamsudin selaku ketua PIM menjelaskan dalam KNIB bahwa:

“Konvensi ini sangat penting karena Muhammadiyah sudah menetapkan satu visi keindonesiaan yang disebut dengan visi Indonesia berkemajuan. Saya kira visi PIM berhimpit dengan visi Muhammadiyah ini, secara esensi cita-cita nasional Indonesia yang oleh Muhammadiyah diberi tafsir kontekstual. Indonesia yang maju, adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Konvensi ini ingin menawarkan kepada bangsa sebuah konsensus Indonesia yang kita cita-citakan dan usaha kita bersama untuk merealisasikannya. Ini tentu sebuah proses panjang yang melibatkan elemen-elemen lain”.

A. Wacana Kebhinekaan dan Toleransi

Muhammadiyah dalam rentang usianya yang sudah lebih dari satu abad telah merasakan dinamika kehidupan berbangsa. Kiprah membangun dan mengisi ruang kehidupan kebangsaan yang berlandaskan bingkai kebersamaan atas prinsip toleransi dan kebhinekaan dari Muhammadiyah, tidak perlu diragukan. Maka kemudian satu langkah yang sangat bijaksana bagi Muhammadiyah untuk memberi tema “Merekat Kebersamaan” dalam acara tahunannya yang disebut Milad Muhammadiyah pada usianya yang 105 Tahun.

Tema ini bermakna Indonesia yang lahir dari hasil kesepakatan pendahulu, harus terus dipelihara agar bisa menjadi negara yang bersatu. Dikutip oleh (Republika.com/17/11/16: 1) Agung Danarto mengatakan bahwa:

“Tidak mudah merajut dan merekatkan bangunan kebangsaan. Mengingat, bangsa ini merupakan bangsa yang sangat besar, dan besar itu tidak sekadar luas wilayah. "Tapi besar karena luasnya keberagaman dan latar belakang sosialnya," Artinya, harus ada upaya aktif dari seluruh masyarakat untuk mewujudkan Indonesia bersatu, agar upaya itu bukan hanya berujung kepada slogan, melainkan realitas.”

Maka dari itu, Sebagai salah satu elemen masyarakat Muhammadiyah harus membina rekayasa kebhinekaan melalui Pancasila yang saat ini sedang memudar di tengah masyarakat karena konflik sosial.

Indonesia adalah contoh konkret untuk kemajemukan suatu bangsa, dan hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai wadah pertarungan untuk berbagai macam ideologi yang mewakili kemajemukan tersebut. Dengan berbagai ideologi yang ada maka kemudian peran Pancasila disini dapat dijadikan sebagai perantara yang mampu merangkul kebersamaan. Kondisi kemajemukan Indonesia sama halnya ketika madinah pada zaman Rasulullah yang dimana saat itu kota Madinah tidak hanya dihuni oleh pemeluk Islam, namun juga oleh Yahudi dan Nasrani. Posisi Pancasila di sini serupa dengan Perjanjian Madinah yang memiliki karakteristik berupa keadilan yang menyeluruh bagi seluruh pihak yang terikat olehnya.

Dalam permasalahan hidup sehari-hari permasalahan yang kerap dibahas dalam koridor Kebhinekaan adalah persoalan fenomena Pluralitas, Pluralitas warna kulit, Pluralitas Etnik, Pluralitas Agama, Pluralitas bahasa, Pluralitas latar belakang pendidikan. Isu seputar Kebhinekaan bukanlah hal yang baru, menurut Amin Abdullah (2000: 56) bahwa Membahas persoalan Kebhinekaan dan Pluralitas ibarat seperti:

“to put a new wine in the old bottle” (memasukkan minuman anggur yang baru kedalam botol yang lama). Botolnya tetap itu-itu saja, dalam arti bahwa isu pluralitas adalah setua usia manusia dan selamanya akan tetap ada. Hanya saja yang membedakan adalah cara untuk membuat anggur yang bisa berubah-ubah sesuai dengan perkembangan teknologi maupun minuman yang ada”.

Dalam logika *“to put a new wine in the old bottle”* maka tidak hayal terjadinya pergeseran arus Pluralitas yang tadinya alami bergeser dengan Pluralitas yang diwarnai dengan persoalan ideologis. Dalam praktik kehidupan sehari-hari

sebelum dicampuri dengan persoalan Ideologis, Ekonomi, Sosial, Politik dan bahkan agama, umat manusia dapat menjalani kehidupan pluralistik setiap hari dengan wajar dan biasa saja tanpa perlu mempertimbangkan sisi benar ataupun salah.

Namun, ketika kemudian manusia bergerak dalam berbagai kepentingan baik dalam koridor organisasi, politik, agama, keamanan dan lain sebagainya mulai mengangkat isu kebhinekaan ke arah kesadaran mereka dan kemudian menjadikannya "*ultimate concern*" maka persoalan pluralitas agama, toleransi dan Kebhinekaan yang alami dan waja-wajar saja berubah menjadi sangat problematik. Dengan berbagai sudut pandang, tolak ukur dan standar dari masing-masing pengusung wacana mulai diperlihatkan, meskipun Sudut pandang yang diambil adalah berdasarkan logika dan hegemoninya sendiri-sendiri (Abdullah, 2000: 56).

Dadang Kahmad dalam (Suara Muhammadiyah, 05/103:18) menyoroti seputar kemajemukan dan kebhinekaan. Kemajemukan menurutnya merupakan sebuah keniscayaan kehidupan manusia, "*kalau kita melihat kepada dasar pijakan teologis dari agama-agama, maka akan kita dapatkan ajaran bahwa kebhinekaan kultur itu merupakan sesuatu yang ditakdirkan dari tuhan.*" Contohnya dalam agama islam yang dengan tegas mengemukakan bahwa kemajemukan merupakan sunatullah, sebuah ketentuan tuhan yang tidak dapat terbantahkan lagi.

Dalam suart al hujurat ayat 13 telah dinyatakan.

"Hai Manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu (manusia) dari seorang laki-laki da seorang perempuan serta menjadikan kamu berbangsa bangsa juga bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi allah ialah yang paling mulia diantara kamu di sisi allah ialah yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya allah maha mengetahui lagi maha mengenal."

Lanjut DK bahwa Kebenaran kitab suci al quran adalah sebuah postulasi yang akurat. Sejalan dengan fakta bahwa manusia lebih senang hidup bersama, hidup berkoloni, berkabilah dan berbangsa-bangsa daripada hidup sendiri dan mengandalkan dirinya sendiri hal demikian sangat di dukung oleh al quran. Maka kemudian peristiwa untuk hidup bermasyarakat merupakan sunatullah atau hukum alam.

Jika kemudian ada beberapa masyarakat yang membentuk kelompok atau kabilah tentunya memiliki tujuan yang sangat mulia, tujuan agar saling mengenal satu sama lain, untuk betaaruf, dengan kedekatan komunikasi dan kenal mengenal ini menurut dadang akan menghindarkan masyarakat yang terbagi dalam beberapa kelompok ini akan terhindar dari konflik dan perpecahan. (Suara Muhammadiyah, Edisi 5/Th.ke-103: 18).

Bukan hanya perbedaan antar agama, adanya perbedaan di dalam agama itu sendiri merupakan sunatullah, maka tidak hayal banyak kelompok-kelompok dan Harokah tercipta untuk kepentingan agamanya, tentunya dengan ciri khas yang ditawarkan masing masing kabilah atau kelompok ambil saja contoh nuansa Islam yang dibawa Muhammadiyah berbedan dengan NU, FPI, HTI SI dan lain sebagainya. Perbedaan lintas kabilah dalam islam ini merupakan masalah muamallah yang di dalam islam sangat diperbolehkan. Muhammad Roem, seperti yang dikutip oleh mengatakan bahwa “*Islam dalam satu perspektum sangat tegas sekali masalah Akidah,*” misalkan kita menganggap ada nabi terakhir selain nabi muhammad, maka mutlak sesat, kita meninggalkan sholat sudah pasti dosa. “*Tapi di spektum lain Islam sangat luwes masalah Muamalah*” seperti sholat subuh hendak menggunakan Khunut atau tidak, dan masalah pandangan keislaman

merupakan masalah muamallah entah islam berkemajuan maupun islam nusantara dapat digolongkan sebagai muamallah.

Indonesia memiliki potensi yang sangat besar sekali, baik berupa SDM atau SDA maupun sistem negara yang modern tiga modal tersebut dapat digunakan untuk merekat kebersamaan, Selain itu Indonesia adalah negara yang berpancasila dan beragama dalam arti hal-hal yang menyangkut tugas kenegaraan tidak dapat dipisahkan dari efek Agama, tidak terbatas pada satu agama saja. Namun, nampaknya ada problematika berbau politis yang menjalar dalam tubuh berpancasila ini yang terjadi akibat perpolitikan nasional, yakni ada nuansa saling membelah antara kanan-kiri, NKRI-anti NKRI, Toleran-Intoleran (Matan, Edisi 137, Desember 2017: 13)

Namun, Akhir-akhir ini menguat isu tentang intoleransi dan radikalisme yang menurut beberapa pihak meningkat dari tahun ke tahun. Berkembang juga isu seputar gerakan anti-Pancasila, anti-Kebhinekaan, anti-NKRI, polarisasi yang membelah bangsa, dan bentuk ancaman lain terhadap ke-Indonesia-an. Isu tentang intoleransi, radikalisme, dan terorisme secara khusus sampai batas tertentu dikaitkan dengan agama khususnya umat Islam.

Namun perlu juga dicermati dengan seksama. Bahwa intoleransi, radikalisme, dan segala bentuk ancaman terhadap ke-Indonesia-an seyogyanya dicandra secara objektif dan komprehensif agar tidak bersifat parsial, tendensius, dan salah pandang. Perlu rekonstruksi konsep, pemikiran, dan parameter yang dapat didialogkan dan dirumuskan secara kolektif tentang fenomena intoleransi, radikalisme, dan segala bentuk anti-kebhunekaan agar terhindar dari tendensi yang sepihak, hitam-putih, dan hanya ditujukan pada satu aspek dan golongan.

Haedar Nashir menyampaikan dalam sambutannya di Resepsi Milad Muhammadiyah 105 bahwa *“Perlu disadari bahwa betapa kompleksnya hidup dalam suatu bangsa yang bhineka dan mengelola kebhinekaan. Masyarakat majemuk (plural society) memiliki sifat non-komplementer, satu sama lain pada dasarnya sulit bersatu,* Ketika bangsa Indonesia yang bhineka itu bersatu, menurut para ahli hal itu karena ada nilai perekat yang disepakati bersama, yakni Pancasila. Manakala nilai perekat itu longgar dan tidak menjadi rujukan yang aktual maka luruhlah kebersamaan, sehingga sekarang Pancasila ditransformasikan kembali untuk menjadi dasar filosofis berbangsa dan bernegara.

Dalam konteks Indonesia, menurut antropolog Prof Koentjaraningrat, pada pembentukan integrasi nasional umat Islam selaku mayoritas memiliki peran dalam integrasi sosial di tubuh bangsa ini. Karena itu sesungguhnya agama dapat menjadi kekuatan kohesi nasional, di samping boleh jadi karena bias pemahaman dan perilaku sebagian pemeluknya sampai batas tertentu sentimen keagamaan dapat menjadi faktor konflik. Tetapi faktor lain pun seperti politik, ekonomi, etnik, dan kedaerahan di tangan orang-orangnya yang memiliki bias-paham dan bias-perilaku dapat pula menjadi faktor disintegrasi sosial, di samping menjadi kekuatan yang menyatukan.

Sementara itu sebagai konsekuensi dari reformasi dan pilihan demokratisasi yang serbaterbuka di tengah arus deras kekuatan asing dan globalisasi yang masuk ke seluruh ranah kehidupan kebangsaan, kini terjadi proses liberalisasi kehidupan politik, ekonomi, dan budaya yang membawa dampak sangat kompleks dalam kehidupan kebangsaan. Proses liberalisasi ini meluruhkan nilai keindonesiaan yang berbasis pada agama, Pancasila, dan kebudayaan yang hidup di tubuh bangsa ini.

Orientasi hidup yang egoistik, hedonis, materialistis, transaksional, rakus, dan oportunistik telah mengoyak kebersamaan dan sendi-sendi kehidupan kebangsaan dan kemanusiaan.

Rusaknya kebersamaan juga dapat terjadi karena kesenjangan ekonomi yang semakin ekstrim. Jika satu persen orang Indonesia dibiarkan tetap menguasai 55 proses kekayaan nasional, maka selain merusak kebersamaan tetapi lebih jauh akan menjadi api dalam sekam yang dapat bermuara pada disintegrasi nasional yang masif. Negara harus berani menegakkan keadilan sosial untuk mengatasi kesenjangan sosial ini. Jangan biarkan segelintir orang dengan tangan raksasa, kerakusan, kekuatan uang, dan pengaruhnya di struktur kekuasaan menguasai Indonesia baik terbuka maupun terselubung jika negeri ini ingin mewujudkan Pancasila dan cita-cita nasional dalam kebersamaan.

Kesenjangan sosial dan keserakahan sekelompok kecil pihak sama gawatnya dengan radikalisme dan terorisme serta ancaman ideologis lainnya, malah mungkin lebih berbahaya. Pemerintah dan kekuatan politik pun perlu makin waspada akan segala ancaman yang berjangka panjang ini. Kaum beriman tentu ingat akan peringatan Allah SWT, bahwa kerusakan di muka bumi terjadi karena ulah-tangan manusia, serta hancurnya suatu negeri karena ada sosok-sosok “al-mutrafun” yang selalu berbuat anarki, rakus, dan wewenang-wenang.

Karenanya diperlukan ikhtiar semua pihak untuk menyelesaikan masalah-masalah kebangsaan ini secara jernih, objektif, dan komprehensif dengan meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. Membangun kebersamaan dalam masyarakat majemuk dan sarat masalah krusial seperti diuraikan itu sungguh merupakan jalan terjal sekaligus mulia yang memerlukan

keberanian dan jihad para pemimpin negeri yang bebas dari kepentingan dan segala bentuk penyanderaan diri. “Sebuah negara terbentuk bukan semata karena kekuasaan, tetapi bersatunya secara integral seluruh kekuatan masyarakat dalam entitas bangsa”, ujar filsuf ternama Spinoza. Karena itu semua pihak, baik pemerintah dan kekuatan politik maupun seluruh komponen bangsa dituntut komitmennya yang kuat untuk merekatkan kebersamaan ketika terdapat retak di tubuh bangsa ini.

Maka dari itu, penulis akan mencoba menguraikan peran muhammadiyah sebagai organisasi besar yang memiliki banyak pengikut di indonesia yang tentunya memiliki peran sentral dalam membendung arus radikalisme dan intoleransi. Dalam Analisis ini akan dilihat pembagian keberagaman yang dimiliki indonesia dan tantangan muhammadiyah terhadap kebhinnekaan di Indonesia.

Setidaknya ada dua permasalahan kebhinnekaan di indonesia dan peran muhammadiyah untuk merawat kebhinnekaan dan toleransi bukan hanya toleransi umat beragama tetapi toleransi di dalam internal umat islam sendiri. Pertama, Kebhinnekaan atau keberagaman terhadap agama yang berbeda-beda dan keberagaman di dalam internal umat islam.

B.1. Kebhinnekaan antar Umat beragama

Muhammadiyah dalam memandang Isu kebhinnekaan dan toleransi antara umat bergama cenderung menggunakan cara-cara yang kreatif sehingga dapat menumbuhkan harmonisitas umat bergama daripada cara kontfrontatif yang cenderung akan menimbulkan kerusuhan antara umat beragama, Hal ini dapat dilihat dari penelitian Alwi Syihab tentang Muhammadiyah yang menurutnya

usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Muhammadiyah dalam dunia pendidikan, kesehatan, sosial merupakan satu langkah bijaksana untuk menjaga keharmonisan anantara umat beragama.

Dengan cara pendekatan yang lebih kompetitif daripada pendekatan konfrontatif dalam penyebaran misi dakwah amar makruf nahi munkarnya Muhammadiyah akan lebih menumbuhkan suasana harmonis. Dalam satu sisi usaha untuk berdakwah yang ketika Zaman Awal Muhammadiyah didirikan oleh Ahmad Dahlan salah satu poinnya adalah membendung arus kristenisasi dan sisi lain menjaga Kebhinekaan dan kerukunan antara umat beragama teruslah berjalan.

Alwi Syihab menggambarkan bahwa Muhammadiyah sebagai gerakan islam amar makruf nahi munkar sangat memiliki kepedulian besar terhadap penetrasi penyebaran kristenisasi yang sangat masif, sehingga dalam rangka menyaingi masyifitas kristenisasi tersebut Muhammadiyah memilih jalan kompetitif, yaitu mencoba menyantuni rakyat indonesiadalam level gras root sehingga menyentuh kebutuhan orang banyak, yang dilakukan dengan mendirikan berbagai lembaga.pendidikan dari tingkat kanak-kanak hinga perguruan tinggi sebagai bentuk amal usaha Muhammadiyah.

Prinsip pokok mengenai pandangan Muhammadiyah terhadap kebhinekaan dapat dilihat bahwa Muhammadiyah meyakini bahwasanya kehidupan bermasyarakat merupakan fitrah dari Tuhan. Hal ini sesuai dengan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah pada pokok pikiran ke dua “Hidup manusia itu bermasyarakat”. Pokok pikiran tersebut dirumus sebagai berikut: “Hidup bermasyarakat itu sunnah (hukum qudrat iradat) Allah atas hidup manusia di dunia ini.” Realitas masyarakat sangatlah pluralistik, terdapat bermacam-macam suku, ras,

dan golongan. Oleh karena itu, jika masyarakat adalah keniscayaan, maka pluralitas masyarakat yang terdapat di dalamnya merupakan keniscayaan juga. Muhammadiyah meyakini bahwasanya pluralitas adalah suatu keniscayaan yang ada dan sudah.

B.2. Kebhinekaan dalam Amal Usaha Muhammadiyah

Kemudian Komitmen terhadap Kebhinekaan Yang telah dilakukan Muhammadiyah adalah dengan mendirikan lembaga pendidikan yang tidak hanya diperuntukkan untuk siswa maupun Mahasiswa muslim saja, namun mahasiswa non muslim berhak atas pendidikan yang sama dengan yang lainnya di lembaga pendidikan Muhammadiyah. Kebhinekaan dan toleransi antar umat bergama dapat dilihat pada Universitas Muhammadiyah Kupang yang hampir 75% Mahasiswanya beragama selain islam. Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta membuat sebuah penelitian yang berjudul *“Salib Terang di Bawah Sinar Sang Surya: Politik Rekognisi Keragaman Agama, Budaya dan Nilai Kepribadian Melalui Pendidikan Multikultural*. Dengan menjadikan Universitas Muhammadiyah Kupang sebagai objek penelitian maka ditemui hasil bahwa Mayoritas Mahasiswa UMP memilih berkuliah di UMP Karena citra Muhammadiyah yang sangat toleran dan selama tahun ke tahun budaya toleransi tersebut tetap terjaga.

Selain itu, dengan penuh kesadaran, sebagai buah komitmen Muhammadiyah dalam Toleransi dan Kebhinekaan, Muhammadiyah melalui majelis pendidikan tinggi tanggal 3-4 November 2017 merancang AIK (Al-Islam dan Kemuhammadiyah) khusus bagi non Muslim yang menempuh pendidikan di

lembaga Muhammadiyah. Karena AIK yang sering diterima oleh mahasiswa non muslim sama dengan AIK yang diberikan pada mahasiswa di PTM pada umumnya, yaitu AIK 1 (Kemanusiaan dan Keimanan), AIK 2 (Ibadah, Akhlak dan Muamallah), AIK 3 (Islam dan Kemuhammadiyah), dan AIK 4 (Islam dan Ilmu Pengetahuan)

Dengan dipilihnya jalan pendidikan sebagai ruang mengakomodasi kelompok minoritas, maka usaha muhammadiyah sangat patut diapresiasi. Sebab pendidikan ruang berseminya ide-ide inklusif, sangat tepat untuk menumbuhkan berbagai pemikiran yang terbuka, strategi bina damai, dan pemahaman modernitas keagamaan (Galung, 1969 dan reardon)

Dalam praktik kehidupan beragama, sesungguhnya para pemimpin organisasi terbesar di Indonesia, seperti Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah, senantiasa berkampanye tentang pentingnya Islam yang cinta damai. Terlepas dari perbedaan strategi dalam rangka melaksanakan “deradikalisasi”, antara Said Agil Siradj dan Din Syamsuddin, telah bekerja keras secara bersama-sama untuk membangun masyarakat Islam Indonesia yang jauh dari sentimen ideologi Islam.

B.3. Keberagaman di dalam Internal Umat Islam

Semenjak awal berdirinya Muhammadiyah, selalu berhadapan dengan realitas keagamaan yang kompleks sehingga akan dapat mempengaruhi Visi dan Misi Muhammadiyah di masa mendatang. Menurut Syamsul Arifin (2000: 74). Kemudian bukan hanya Muhammadiyah, Indonesia pada pasca reformasi 1998 makin dihadapkan pada dinamika internal umat islam yang luar biasa. Pada era ini banyak bermunculan organisasi islam baru, bentuknya malah banyak yang bercorak

kelompok selain organisasi formal. Dalam kelahiran kelompok-kelompok yang baru disertai juga kemunculan paham-paham keislaman yang sangat beragam. Dengan demikian penggolongan dan pengelompokan Umat Islam di Indonesia semakin luas dan frekuensinya kian beragam.

Kemajemukan dan keberagaman umat Islam semakin tidak dapat dihindari. Karena mengingat umat Islam di Indonesia tidaklah homogen dan malah sangat heterogen dari yang paling konservatif hingga progresif dari yang moderat hingga yang ekstrem kiri maupun kanan. Umat Islam Indonesia sejak lahirnya organisasi-organisasi yang membawa nama Islam ini tidak lepas dari konflik antar paham keagamaan. Bahkan perpecahan di dalam internal organisasinya sekalipun selalu ada perbedaan dan konflik. Seperti buku Pradana Boy Zulfah yang berjudul "*membela Islam murni*" (Suara Muhammadiyah, 2017) menelisik sudut pandang keislaman kader Muhammadiyah, dari yang paling konservatif hingga paling progresif, dari yang paling moderat hingga yang paling ekstrem semuanya lengkap ada di Muhammadiyah.

Dalam hal Kebhinekaan atau keberagaman di dalam tubuh *internal* umat Islam, Muhammadiyah setidaknya akan menghadapi beberapa persoalan, diantaranya yaitu: Wacana Purifikasi Islam, Wacana Partai Politik Islam. Dalam hal purifikasi Islam: *pertama*, Muhammadiyah dihadapkan kepada realitas berbagai paham dan praktik keberagaman masyarakat Islam di Indonesia yang sering mencampur baurkan antara budaya Islam dengan budaya nenek moyang yang ada sebelum kedatangan Islam di Indonesia. Menurut Syamsul Arifin (2000: 74) Bahwa faktor jarak Indonesia dengan Timur Tengah (Sebagai sumber Islam yang Autentik) berpengaruh besar terhadap autentikasi Paham keislaman.

Kemudian Clifort Geertz salah seorang antropolog yang sering mengkaji masyarakat islam di Indonesia menemukan kesenjangan perilaku umat islam di Jawa sebagai hasil darinya adanya “faktor jarak” yang kemudian membagi masyarakat islam di Indonesia menjadi tiga varian. Yaitu abangan, priyayi dan santri. Kemudian menurut Geertz kesenjangan tersebut bisa berupa nominal antara corak santri, priyayi maupun abangan. Sehingga kemudian ia menyebut keislaman Jawa bercorak “nominalis”

Melihat fenomena keberagaman faham dan adanya pencampurbauran antara ajaran Islam dengan ajaran nenek moyang (yang merusak) maka yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah melakukan purifikasi ajaran Islam merupakan langkah yang sangat bijaksana. Menurut pandangan Muhammadiyah bahwa praktik keberagaman umat Islam harus merefleksikan autentisitas dari Al Quran dan As Sunah. Cara Muhammadiyah ini dapat dikatakan berhasil dengan bukti adanya penyebaran faham Muhammadiyah di berbagai wilayah di Indonesia.

Kemudian persoalan kedua, Muhammadiyah akan berbenturan dengan benturan dengan penetrasi kalangan Misionaris dan gerakan liberalisme yang mendapatkan dukungan kuat dari penguasa di negara lain. Dalam penetrasi kalangan Nasrani dapat dilihat dalam Desertasi doktor Alwi Shihab “Membendung arus: respon gerakan Muhammadiyah terhadap penetrasi misi Kristen di Indonesia (Miza, 1998) yang dituliskan bahwa setidaknya ada dua hal yang menarik” pertama adalah pendirian Muhammadiyah yang tidak hanya ditujukan sebagai gerakan purifikasi ajaran Islam tetapi juga membendung misi misionaris Kristen untuk menyebarkan agamanya.

Hal menarik kedua adalah dalam membendung kristenisasi, pada masa Ahmad Dahlan Muhammadiyah dengan mendobrak tradisi Islam tradisional dengan pembaharuan di dunia pendidikan mendirikan sekolah dengan konsep modern seperti yang dilakukan kalangan Kristen yang selain memberikan mata pelajaran umum juga memberikan mata pelajaran agama. Berbeda dengan pendidikan sekolah Islam tradisional saat itu yang menekankan kepada konservatisme mereka dan cenderung mengabaikan pembaharuan yang modern.

Kemudian berhadapannya Muhammadiyah terhadap gerakan sekuler dan liberal. Virus liberal ini nampaknya sudah merambah ke berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia, baik dari segi agama, sosial, politik, ekonomi, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Menurut Din Smasudin seperti yang dikutip oleh [pwmu.com \(https://pwmu.co/4457/04/14/din-liberalisasi-tantangan-muhammadiyah-hari-ini/\)](https://pwmu.co/4457/04/14/din-liberalisasi-tantangan-muhammadiyah-hari-ini/) misalkan saja dalam bidang ekonomi liberalisasi dapat dilihat dengan semakin merebahnya kapitalisme dalam sektor ekonomi. Kemudian dalam contoh lain liberalisasi dalam kebudayaan, melalui siaran Televisi maupun dunia perfilman masyarakat Indonesia khususnya kaum milenial digiring untuk mengikuti trend perubahan kebudayaan.

Muhammadiyah memiliki peran yang sangat penting sekali dalam membendung arus liberalisasi. Seperti disertasi Alwi Sihab yang telah dijelaskan di atas bahwa Muhammadiyah lebih memilih jalan Kompetitif daripada jalur konfrontasi. Dalam rangka membendung arus liberalisme dalam bidang ekonomi Muhammadiyah mendirikan sentra perekonomian yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam seperti adanya bank syariah yang dinilai lebih Islami daripada bank konvensional yang dinilai sangat liberatif dengan menerapkan suku bunga yang

kadang kala membebani orang tanpa disadari. Gerakan Belanja di warung tetangga yang merupakan propaganda dari LHKP PWM DIY merupakan contoh salah satu langkah yang sangat bijaksana dalam membendung arus liberalisme dunia ekonomi, gerakan ini muncul akibat kegelisahan dari maraknya sentra ekonomi kapitalis milik golongan kongklorat sehingga menggerus perekonomian warga.

Kedua persoalan sosial keagamaan diatas muaranya adalah toleransi terutama yang bercorak keagamaan. Secara internal Muhammadiyah berhadapan dengan kelompok tradisionalis yang masih memegang kebudayaan leluhur (yang merusak nilai-nilai Islam) sehingga diperlukanya purifikasi ajaran islam dan di sisi eksternal muhammadiyah berhadapan dengan kristenisasi dan liberalisasi berbagai aspek kehidupan.

Keberhasilan Muhammadiyah dalam menghadapi dua persoalan diatas kerap memunculkan pujian dari berbagai kalangan. Dua diantaranya adalah James Peacock dan Mark R Woodward yang menganggap bahwa Muhammadiyah memiliki gerakan dengan daya tahan dinamika puritan ndalam menegakkan islam yang kuat. Namun komentar terkait kondisi Muhammadiyah dan kondisi umat islam Indonesia khususnya muncul dari Kuntowijoyo yang mengatakan bahwa Muhammadiyah dan organisasi islam lainnya mengidap penyakit “ idiocracy” atau kekuasaan ciri khas sehingga terlihat sangat kaku.

Kuntowijoyo memberikan contoh di dalam tubuh Muhammadiyah khususnya dan Umat islam seluruhnya terdapat penyakit kultural yang sekan mendarah daging dan tidak bisa hilang, seperti adanya alergisitas warga Muhammadiyah dan Masyarakat muslim terhadap corak budaya organisasi lain hanya karena corak tradisi dan kebudayaan tersebut bukan miliknya. Selain itu umat

Islam di Indonesia dapat dikategorikan mengidap penyakit yang di dalam sosiologi dinamai “labeling”. Penyakit labeling ini sangat berbahaya karena di dalam interaksi antar umat beragama, penyakit “labeling” tersebut merupakan satu sumber konflik yang nyata,

Konsekuensinya penyakit “labeling” ini akan menganggap tradisi dari kelompok lain sebagai sebuah penyimpangan yang oleh warga Muhammadiyah disebut sebagai “bidah. Bisa jadi ketegangan antara Warga Muhammadiyah dan Nadlatul Ulama yang dianggap masih menerapkan tradisi nenek moyang serta organisasi Islam lainnya terjadi akibat labelisasi dan justifikasi sepihak. (arifin, 2000: 76).

Kecenderungan umat beragama termasuk umat Islam didalamnya sudah barang tentu akan menyatakan kebenaran masing-masing yang kadangkala berbeda-beda, yang oleh Amin Abdullah (2000: 60) disebut sebagai sebuah “Klaim Kebenaran”. Jika kemudian kita hendak merujuk kepada Al Quran “klaim kebenaran” dari masing-masing pihak ini telah dijelaskan di dalam Al Quran QS AL-Baqarah: 111 Yang berbunyi.

“Orang-orang yahudi berkata: orang-orang Kristen tidak berdiri di atas kebenaran, dan orang-orang Kristen pun berkata ‘orang yahudi tidak berdiri di atas kebenaran’, sedang kedua pihak membaca surat yang sama” (QS. AL-Baqarah: 111)

“Mereka berkata” tidak ada yang masuk ke surga kecuali orang-orang yahudi atau Kristen’ yang demikian itulah agama-agama mereka. (QS. Al Baqarah: 111)

“Orang-orang yahudi dan Kristen tidak pernah menyukai engkau (wahai Muhammad) kecuali jika engkau mengikuti agama mereka katakanlah (kepada mereka) “yang merupakan petunjuk adalah petunjuk dari Allah (bukan dari orang-orang yahudi atau Kristen)

“Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-sekali tidak akan diterima (agama itu) dari padanya dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi.” (QS. Ali-Imran: 85)

Muhammadiyah secara organisatoris memiliki komitmen yang sangat tinggi dalam merawat ukhuwah islamiyah. Hal ini dapat dilihat dari surat pernyataan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 169/MLM/1.0/E/2015 Tentang Ukhuwah dan kemaslahatan Bersama mengisaratkan bahwa:

1. *“Islam mengajarkan sesama umat islam itu bersaudara (QS. Al Hujarat: 10) yang harus saling menjaga ukhuwah dan tidak boleh terpecah belah (QS. Ali-Imran). Di tubuh umat islam diakui adanya keberagaman paham pandangan keislaman maka penting untuk masing-masing pihak untuk bermuhasabah untuk senantiasa meluruskan keyakinan , paham dan pengmalan islam uamh berpijak kepada al-quran dan as-sunah yang maqbullah.*
2. *Dalam menyikapi perbedaan paham atau pandangan keislaman di tubuh umat islam maka diperlukan pendekatan dakwah dan mengedepankan hikmah, edukasi, dan dialog yang baik (QS. An-Nahl: 125) disertai sikap saling menasehati dengan benar dan sabar (QS. Al-Asr 1-3). Penting dikembangkan sikap saling bertoleransnis (tasamuh) dan menghargai keberagaman (tanawu’) yang membawa kemaslahatan. Sebaliknya dihindari atau dijauhi sikap saling mengkafirkan yang dapat mempertajam perbedaan, konflik, dan permusuhan dan muaranya merugikan umat islam sendiri.*
3. *Berkaitan dengan konflik politik di yaman membawa muatan ketegangan isu suni dan syiah dengan segala kaitanya maupun dengan perbedaan paham di dalamnya, Muhammadiyah mengajak semua pihak untuk saling menahan diri dan tidak melakukan tindakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip ukuwah islamiah serta dapat merugikan kepentingan umat islam dan bangsa secara keseluruhan.*
4. *Muhammadiyah dengan dasar pandangan islam yang merujuk pada al quran dan sunnah nabi yang maqbulah, tidak menyetujui paham yang menyimpang dari prinsip-prinsip akidah yang selama ini menjadi pandangan yang muktabarah di tubuh umat islam. Namun demikian, muhammadiyah tidak menyetujui segala bentuk pandangan dan tindakan yang mengandung muatan kekerasan serta permusuhan yang pada akhirnya islam dan umat islam sendiri.*
5. *Khusus bagi warga muhammadiyah dan institusi di seluruh tingkatan dan lingkungan agar memberikan uswah hasanah dalam mengembangkan ukhuwah ditengah keragaman pandangan dan paham keislaman. Sebaliknya, tidak membawa isu atau kegiatan yang dapat menimbulkan suasana perpecahan dan konflik di tubuh umat islam pada umumnya dan internal persyarikatan pada khususnya. Disamping itu, agar tetap fokus dalam upaya meningkatkan kualitas di berbagai bidang gerakan muhammadiyah.*

B. Wacana Indonesia Berkemajuan.

Dalam konteks bangsa dan negara “Indonesia Berkemajuan” mengandung substansi dan senapas dengan cita-cita nasional yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 yaitu “Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”. Dalam tafsir muhammadiyah sebagaimana dirumuskan dalam buku Revitalisasi Visi dan Karakter bangsa (2009) cita cita nasional Indoneisa tersebut diformulasikan dalam kalimat “negara indonbesia yang maju, adil, makmur, bermartabat dan berdaulat” Indonesia yang berkemajuan juga sejalan dengan semangat “memajukan” kesejahteraan umum baik kesejahteraan yang bersifat

jasmani maupun rohani, fisik maupun non fisik.

Kata Indonesia berkemajuan mengandung arti Indonesia dapat menjadi maju, ingin menjadi maju sekaligus “berbuat atau bekerja menjadi maju”. Indonesia yang maju atau berkembang karena sifatnya yang ideal merupakan proses yang tiada akhir, sehingga tujuan atau cita cita tersebut harus terus dilakukan dari satu generasi ke generasi selanjutnya sampai akhir zaman. Karena, kata “Berkemajuan” merupakan proses sekaligus tujuan.

Indonesia Berkemajuan dalam konteks pemikiran Muhammadiyah senapas dengan isu sentral muhammadiyah tentang “Islam Berkemajuan” sebagai pandangan keislaman Muhammadiyah yang telah dinyatakan dalam “Pemikiran Muhammadiyah Abad kedua” hasil muktamar ke 46 di Yogyakarta tahun 2010. Ikon “berkemajuan” selain senapas dengan spirit komitmen dan cita-cita Muhammadiyah sebagai gerakan islam yang mengemban misi dakwah dan tajdid sepanjang perjalanan sejarahnya dan sudah dibuktikan dalam langkah nyata gerakannya, juga sejalan dengan cita-cita universal setiap bangsa dan negara di manapun . Semua negara dan bangsa mencita-citakan kemajuan, dan semua hal atau

aspek seperti keadilan, kesejahteraan, kemakmuran dan kata-kata yang sejenis lainnya sesungguhnya menuju pada keadaan yang lebih baik dan dapat di bingkai secara umum dan substantif dengan istilah kemajuan. (Suara Muhammadiyah no 20 th ke 98 16-30 november 2013: 6)

Dalam konteks realitas berbangsa dan bernegara saat ini “kemajuan” dan “mencerdaskan” sangat relevan dan menjadi suatu keniscayaan. Indonesia setelah 68 tahun merdeka masih tertinggal dalam sejumlah aspek kehidupan. Di bandingkan dengan negara-negara tetangga terutama Singapura, Malaysia, Thailand. Pada saat yang sama masih terdapat realitas ketradisional, keterbelakangan, kebodohan, pembodohan, irrasionalitas dan sejenisnya baik dalam kehidupan berbangsa maupun dalam mengurus negara. (Suara Muhammadiyah no 20 th ke 98 16-30 november 2013: 6)

Negara sebagai fenomena modern masih banyak di konstruksi dan diurus dengan cara-cara yang tradisional, sehingga menyebabkan salah aruskorupsi, penyalahgunaan, penyelewengan, dan bentuk-bentuk ketertinggalan. Negara dan bangsa tidak diurus dan dikelola dengan mentalitas kebhinekaan dan langkah-langkah yang cerdas dan berkemajuan, sehingga Indonesia masih jauh dari kata cerdas dan maju dalam segala aspek kehidupannya sebagaimana layaknya negara dan bangsa maju.

Di Syamsudin dalam (Suara Muhammadiyah no 20 th ke 98 16-30 november 2013: 6) Menyatakan bahwa ada hubungan yang sangat harmonis antara “Islam berkemajuan” dengan “Indonesia Berkemajuan” hal tersebut dapat dilihat pada tahun 1990 dan 1912 KH Ahmad Dahlan menggagas konsep berkemajuan dari sudut pandang keislaman. Karena Muhammadiyah memiliki konsep Islam

Berkemajuan dan bertempat di Indonesia maka Indonesia haruslah berkemajuan. Maka kemudian Muhammadiyah menurut din ingin mensinkronkan Islam berkemajuan dengan Indonesia Berkemajuan.

Muhammadiyah melalui Haedar Nashir memberikan 6 rekomendasi nawa cita jika Presiden Jokowi kembali terpilih menjadi presiden pada kontestasi pemilu 2019, isi 6 rekomendasi nawa cita adalah; *Pertama*, jadikan nilai agama yang hidup di bangsa ini sebagai nilai luhur dalam berbangsa dan bernegara, sebagai wujud sila Ketuhanan Yang Maha Esa. *Kedua*, menjadikan Pancasila sebagai landasan filosofi, alam pikir seluruh bangsa dan negara. Sehingga Pancasila betul-betul terwujud. *Ketiga*, adalah menyusun dan melaksanakan kebijakan ekonomi berkeadilan sosial untuk mengatasi kesenjangan sosial. *Keempat*, mewujudkan kedaulatan bangsa dan negara. *Kelima*, restrukturisasi pendidikan nasional. *Keenam*, proaktif pemerintah untuk dunia Islam.

Dalam penyampaian nawa cita oleh Haedar Nashir ketika mengunjungi Istana Presiden dapat disimpulkan bahwa ada dukungan dan harapan Muhammadiyah untuk presiden Jokowi dalam berkontestasi dalam pemilihan umum tahun 2019, selain itu. Muhammadiyah era Presiden Joko Widodo lebih terbuka dan lebih menerima kepemimpinan era presiden Jokowi ketimbang era SBY ketika Muhammadiyah dipimpin Din Syamsudin, hal ini terbukti dengan betapa dekatnya beberapa tokoh Muhammadiyah dengan Jokowi seperti Ahmad Syafii Maarif, Din Syamsudin yang diangkat menjadi utusan khusus presiden dalam dialog antar agama dan peradaban.